OTOMASI SISTEM PENERIMAAN NEGARA UNTUK MENJAMIN KUALITAS DAN AKUNTABILITAS DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Disampaikan dalam "*Focus Group Discussion* Persiapan *Assessment* Pelaksanaan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) Indonesia" yang diselenggarakan oleh Sekretariat Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Bandung pada tanggal 10-12 Juli 2014.

Oleh : Taukhid
Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan

ORGANISASI DAN KOORDINASI PELAYANAN DJPBN

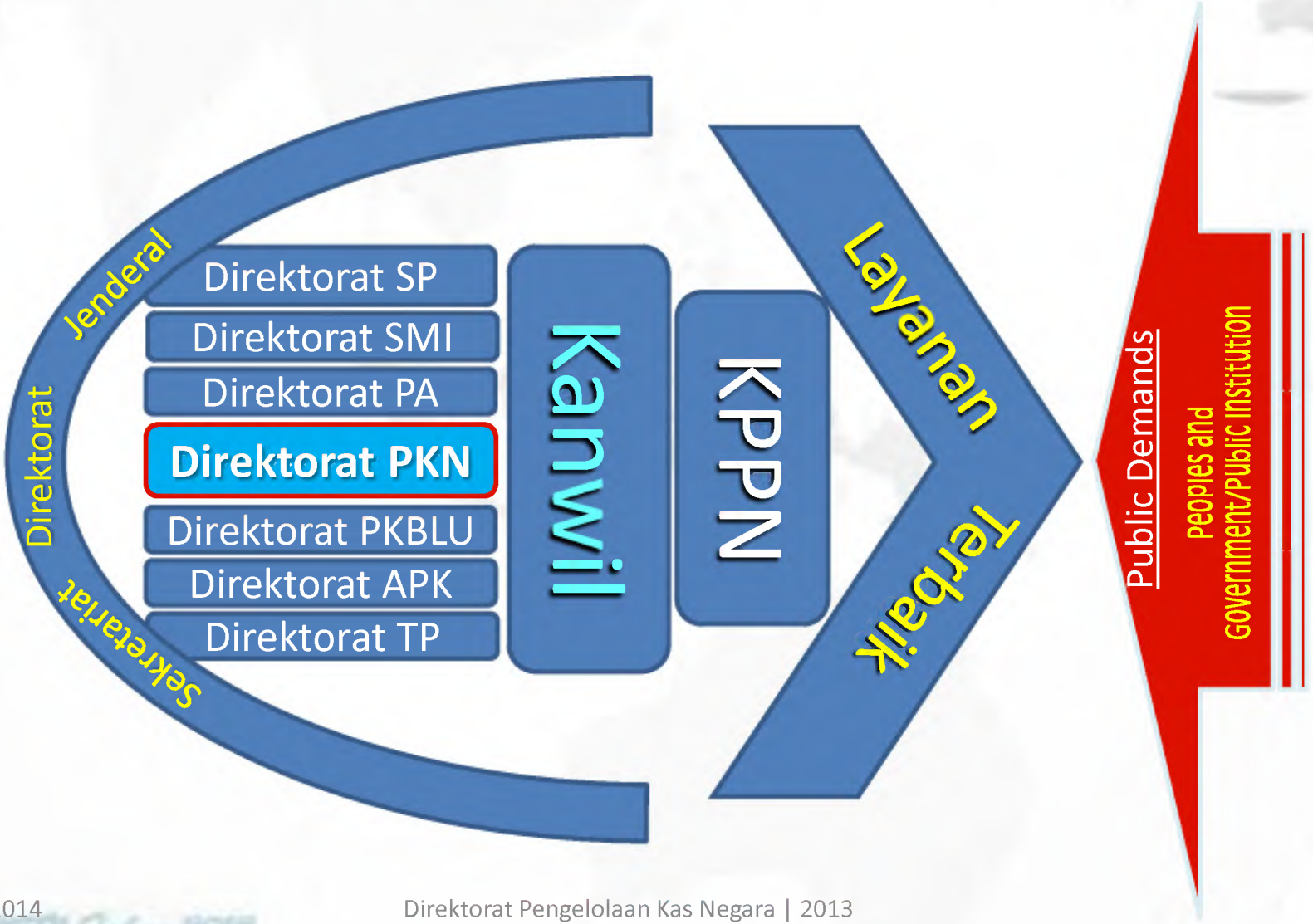

Visi&Misi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

KANTOR PUSAT

Pembuatan Kebijakan

KANWIL

Koordinasi dan Supervisi

Bagian Umum | Bidang PA | Bidang PP | Bidang AKLAP

KPPN

Pelaksanaan Kebijakan

SATKER

K/L
BLU
PENGELOLA
Badan lain penyelenggara PFK (Taspen, Askes, Asabri, Bulog, dll.)

MEDIATOR

BO I
BO II
BO III
Bank/Pos.Persepsi
Kantor Pos (KPRK)

LAYANAN MASYARAKAT

Layanan Penerimaan Negara

- **Jenis**
  - Perpajakan
  - Bukan Pajak
  - Pengembalian Belanja dan Transitoris
- **Metode**
  - Giral and TSA (*Treasury Single Account*) *based*
  - Pencatatan dengan sistem MPN (Modul Penerimaan Negara)
- **Jenis Mata Uang**
  - Rupiah
  - Valas
- **Geografis**
  - Di Daerah (KPPN):
    - Melalui Bank/Pos Persepsi (Sistem MPN)
    - Melalui Potongan SPM (di-*Forward* ke Sistem MPN)
  - Di Pusat (Dit. PKN):
    - Melalui R-KUN pada Bank Indonesia

PRINSIP

- **MISI:**

  Menghimpun setoran penerimaan negara secara cepat dan aman untuk menjamin ketersediaan kas (providing cash, timely and sufficiently) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembayaran tagihan kepada negara .

- **VISI:**

  Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, membayar setoran kepada negara secara mudah dan aman.

Prinsip Penyediaan Layanan Maksimum

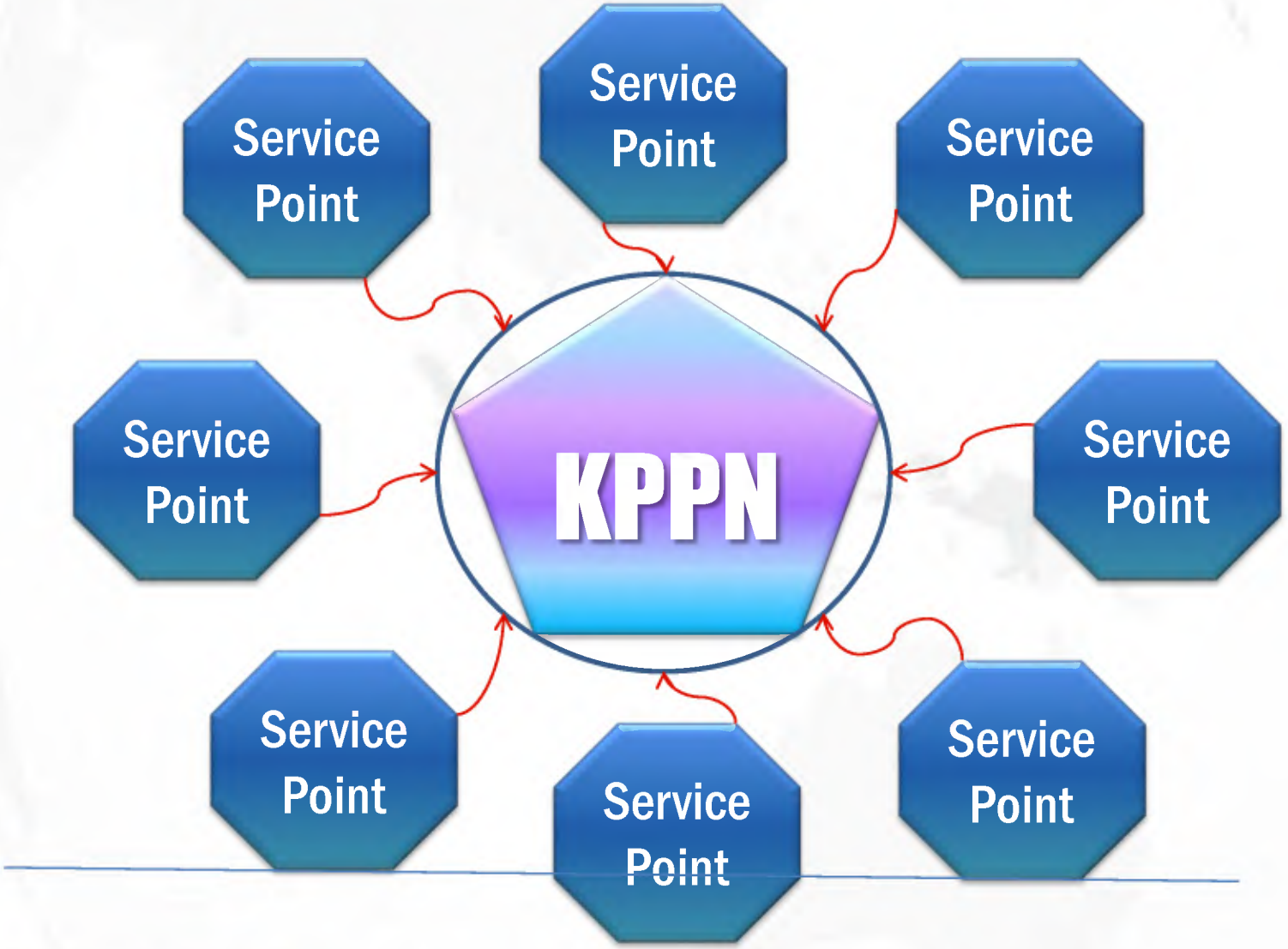

NO.	BANK	NO.	BANK	NO.	BANK	NO.	BANK
1	Bank BRI	23	Bank ABN AMRO	45	Bank Kalsel	67	Bank Kesawan
2	Bank Deutche	24	Bank BNP Paribas	46	Bank Kalbar	68	Bank BTN
3	Bank JP Morgan	25	Bank United Overseas	47	Bank Kaltim	69	Bank Sumsel
4	Bank Mandiri	26	Bank Ekonomi Raharja	48	Bank Sulsel	70	Citibank
5	Bank BNI	27	Bank ANZ Panin	49	Bank Sulut	71	Bank Of America
6	Bank Danamon	28	Bank Woori Indonesia	50	Bank NTB	72	Bank Mega
7	Bank Permata	29	Bank Bumi Artha	51	Bank Bali	73	Bank Bukopin
8	Bank Central Asia	30	Bank Artha Graha	52	Bank NTT	74	Bank Jasa Jakarta
9	Bank Internasional Indonesia	31	Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	53	Bank Nusantara Parahyangan	75	Bank Syariah Mandiri
10	Bank Panin	32	Bank Antar Daerah	54	Bank Bengkulu	76	Bank Bumi Putera
11	Bank Commonwealth	33	Bank Mutiara	55	Bank Sulteng	77	Bank Korean EBD
12	Bank Buana Indonesia	34	Bank Mayapada	56	Bank Sultra	78	Bank Finconesia
13	Bank CIMB Niaga	35	Bank Jabar	57	Bank Papua	79	Bank Kalteng
14	Bank NISP	36	Bank DKI	58	Bank Swadesi	80	Bank Chinatrust
15	Bank Bangkok	37	Bank DI Yogyakarta	59	Bank Muamalat Indonesia	81	PT. Pos Indonesia
16	Bank HSBC	38	Bank Jateng	60	Bank Mestika Dharma	82	Bank Maluku
17	Bank Of Tokyo Mitsubishi	39	Bank Standard Chartered	61	Bank Metro Ekspress	83	Bank OCBC Indonesia
18	Bank Rabo	40	Bank Aceh	62	Bank Sinar Mas	84	BPD Jambi
19	Bank DBS Indonesia	41	Bank Sumut	63	Bank Maspion	85	Bank Himpunan Saudara
20	Bank Resona Perdania	42	Bank Nagari	64	Bank Hana		
21	Bank Mizuho	43	Bank Riau	65	Bank Ganesha		
22	Bank Lampung	44	Bank Jatim	66	Bank Halim Indonesia		

TIME-LINE

FROM 1945

Layanan Setoran Penerimaan Negara: *Time-Line*

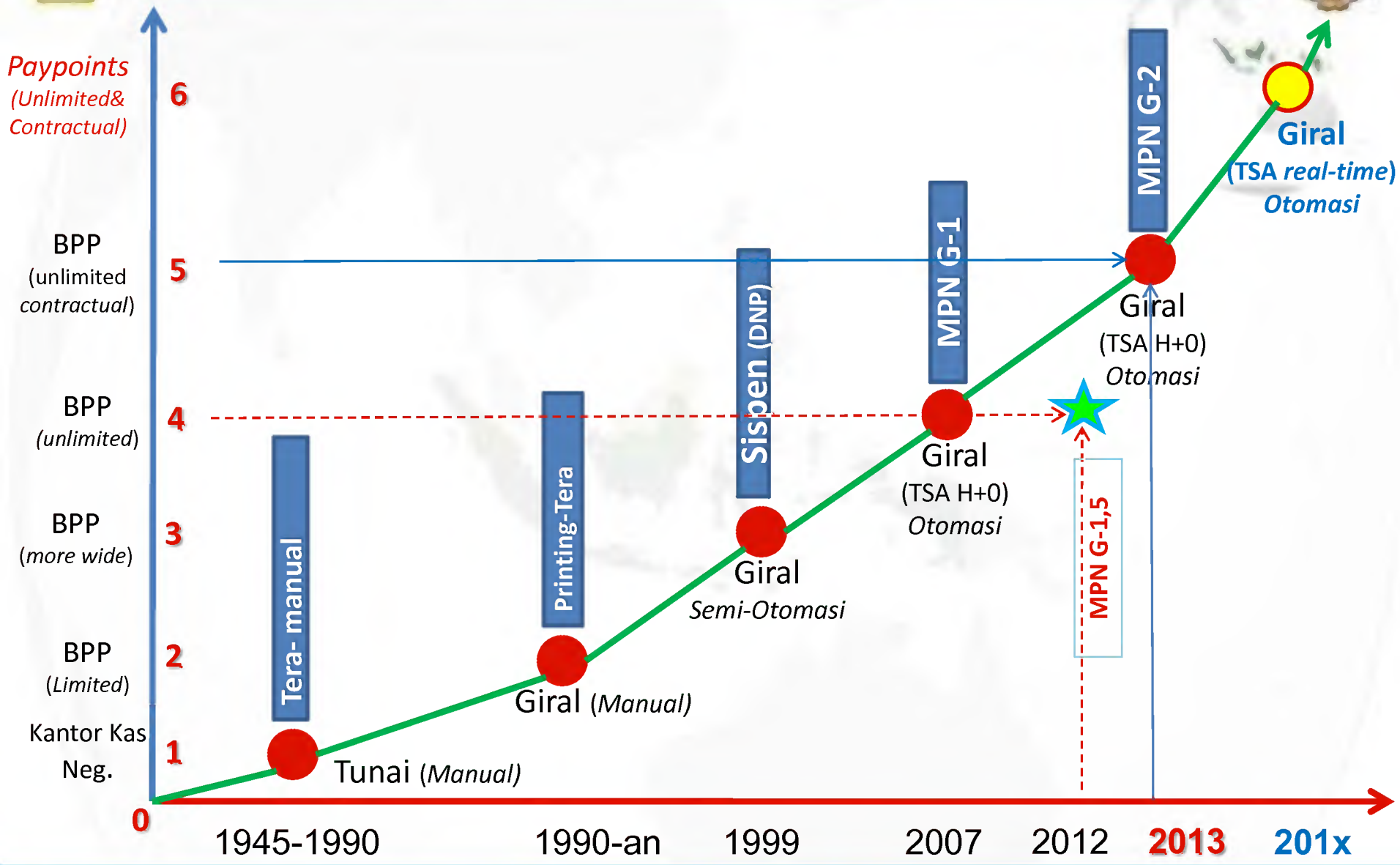

Catatan:

MPN G-1,5 telah menggunakan aplikasi *Electronic Billing System (e-Billing)* yang dapat diakses langsung

Change Driver

Mengapa ?

OPINI AUDIT BPK-RI[1)]

"Data transaksi Penerimaan Negara yang dilakukan melalui Sistem MPN **Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya** (*DISCLAIMER*)".

Opini didasarkan atas tidak dapat dijelaskannya transaksi-transaksi hasil rekonsiliasi Sistem MPN seperti transaksi kategori **REVERSAL**, **TIDAK DIAKUI**, **PARTIAL MATCH**, **MPN UNMATCH**, dan **LKP UNMATCH**.

1) **HASIL AUDIT BPK TAHUN 2009 DAN 2010**

LATAR BELAKANG PENYEMPURNAAN SISTEM MPN

HASIL AUDIT BPK TAHUN 2009 DAN 2010

OPINI AUDIT BPK-RI

"Data transaksi Penerimaan Negara yang dilakukan melalui Sistem MPN **Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya** (***DISCLAIMER***)".

Opini didasarkan atas tidak dapat dijelaskannya transaksi-transaksi hasil rekonsiliasi Sistem MPN seperti transaksi kategori **REVERSAL, TIDAK DIAKUI, PARTIAL MATCH, MPN UNMATCH**, dan **LKP UNMATCH**.

Penjelasan Istilah :

PARTIAL MATCH	:	Satu atau dua elemen data transaksi tidak sama.
REVERSAL	:	Pembatalan Transaksi oleh *Teller*.
TIDAK DIAKUI	:	Tercatat dalam Sistem MPN, tidak di Sistem Bank.
MPN UNMATCH	:	Tercatat dalam Sistem MPN, tidak dilaporkan ke KPPN.
LKP UNMATCH	:	Tidak tercatat di Sistem MPN, dilaporkan ke KPPN.
CANCEL OUT MATCH	:	Dibatalkan di Sistem MPN, dilaporkan ke KPPN.

KONSEKUENSI ATAS OPINI AUDIT BPK-RI

– KOMITMEN PEMERINTAH KEPADA BPK RI

Program Penyempurnaan Administrasi Setoran Penerimaan Negara melalui sistem MPN, melalui:

- Monitoring Harian atas data transaksi Penerimaan Negara dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas data transaksi Penerimaan Negara yang dicatat melalui Sistem MPN, terutama atas hasil penyempurnaan proses Rekonsiliasi Sistem MPN.
- Pelaksanaan klarifikasi secara bulanan atas data transaksi hasil Rekonsiliasi kategori Unmatch Data, khususnya status transaksi **Reversal, Tidak Diakui**, dan **MPN Unmatch.**
- Mengembangkan sistem **MPN generasi baru** (**MPN G-2**) berbasis otomasi.

– TARGET PEMERINTAH

Opini Audit BPK **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) atas LKPP Tahun 2011 dan LKPP selanjutnya.

PMO-MPN Untuk Koordinasi Peningkatan Kualitas Dan Akuntabilitas Data Transaksi Penerimaan Negara

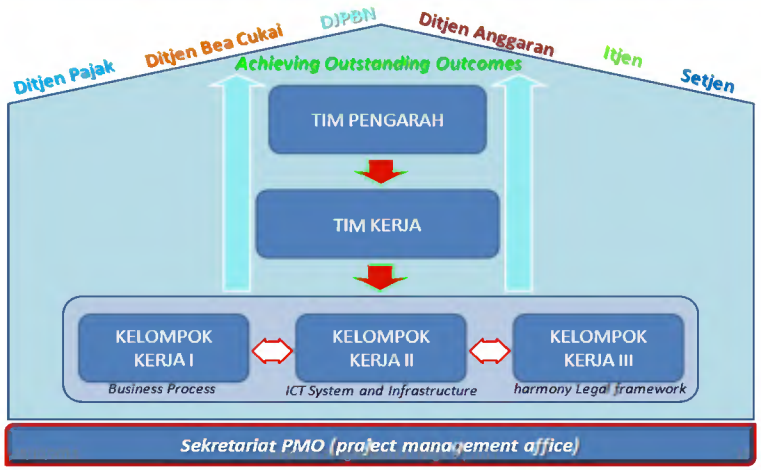

Peningkatan Koordinasi Internal Kemenkeu

PMO untuk MPN

- Sistem MPN merupakan ***core system*** bagi Pengembangan Sistem Penerimaan Negara di Indonesia. Menteri Keuangan adalah ***the Sole Owner*** atas Sistem MPN.
- Sejak pertengahan 2011, *System and Ownership* MPN sebagai *core system* Penerimaan Negara mulai disepakati perlunya ***re-defining***, *in-term of a system and/or authority (redistribution of authority).*
- Ditjen Perbendaharaan selaku pelaksana fungsi *Chief Financial Officer* Pemerintah merupakan ***Settlement authority*** dalam pelayanan Penerimaan Negara dan menjadi ***key-owner*** Sistem MPN.
- Direktorat Jenderal Pajak, Ditjen Bea Dan Cukai, dan Ditjen Anggaran selaku pelaksana fungsi administrasi penerimaan negara perpajakan atau kepabeanan dan cukai atau PNBP merupakan ***billing authorities*** dalam pelayanan Penerimaan Negara dan menjadi ***co-owners*** terhadap Sistem MPN. Pusintek mendukung aspek *IT Systems and Infrastructures*.
- Untuk menjamin terselenggaranya sinergitas pelayanan Penerimaan Negara dan soliditas sistem MPN secara menyeluruh, perlu dibentuk ***Project Management Office*** (PMO) yang selanjutnya secara *independent* dan kolegial bertugas menjaga, memonitor, mengevaluasi, dan menjamin terwujud dan berjalannya sistem MPN bagi penyelenggaraan pelayanan Penerimaan Negara sebagaimana mestinya.

PERKEMBANGAN PENYEMPURNAAN SISTEM

DISEPAKATI *BLUE-PRINT* PENGEMBANGAN SISTEM

Penyempurnaan Sistem MPN

Dari Kondisi	Menjadi	Manfaat
Manual Billing System	Electronic Billing System	Akuntabilitas, Fleksibilitas, dan Kecepatan Penguasaan Kas
Layanan *Over The Counter*	Layanan *On-line* dan Fleksibel	Ketersediaan Layanan Tanpa Tergantung Waktu dan Tempat
Tidak Melayani **Seluruh** Transaksi Penerimaan Negara	Melayani **Seluruh** Transaksi Penerimaan Negara	Akuntabilitas seluruh data transaksi penerimaan negara
Layanan *Single Currency (Rupiah)*	Layanan *Multiple Currencies* (termasuk Valas)	Ketersediaan Kas dalam berbagai jenis Valuta
Disclaimer	WTP	Kepercayaan Publik
Pengelolaan Layanan Dan Data Transaksi Per Unit Eselon I (Individual)	Pengelolaan Layanan Dan Data Transaksi Bersama dan Terkoordinasi	Kesatuan Database dan Informasi Penerimaan Negara

PROGRESS PENGEMBANGAN SISTEM MPN MENUJU SISTEM MPN G-2

No.	Sistem MPN Menuju MPN G-2	Jadwal Operasionalisasi	Status	Agen Layanan (Bank/Pos Persepsi)	Progress
1.	Sistem MPN *(Existing System)*	Sejak Tahun 2007	*Steady*	Semua Bank/Pos Persepsi	Opini WTP (Tahun 2011, 2012)
2.	Sistem MPN *(Existing System* Plus fasilitas ATM)	Mulai Juli 2013 (OTC), November 2013 (ATM)	*On progress*	1. OTC (Semua) 2. ATM (BRI, BNI, Mandiri, BCA)	Khusus PPh Final Akun 411128 KJS 420 (PP 46/2013)
3.	Sistem MPN (Lojik layanan MPN G-2, Infrastruktur *Existing System)*	Sejak 6 Februari 2012	*Exponded* ke seluruh Indonesia	Bank/Pos Persepsi (Bank Mandiri, Kantor Pos)	Khusus Pembayaran Pajak. (Jumlah Pengguna meningkat signifikan. Real per 31-11-13 =8341 transaksi senilai Rp 633,42 miliar)
4.	Sistem MPN Valas *(Existing System,* valuta dalam USD)	Sejak November 2012	*Steady*	Bank Persepsi BNI	Untuk Pajak & PNBP (Real per 31 November 2013: 1423 transaksi senilai US$33,7juta = 2.557)
5.	**Sistem MPN G-2**	Piloting pada Triwulan IV 2013	*On progress (BRI siap live Nov 2013)*	Bank/Pos Persepsi Peserta Piloting (BRI, BNI, Mandiri, BCA, BJB, Permata, Mabotbank, CIMB Niaga, Permata, dll)	Terkendali dan terjadi percepatan.

KEBIJAKAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR BPK RI

KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN SISTEM MPN

No.	Uraian	Outputs	Outcomes
1.	Peningkatan kualitas dan akuntabilitas data transaksi Penerimaan Negara yang dihasilkan oleh Sistem MPN G-1 (*existing*).	Tersedianya klarifikasi atas *unclear data* hasil Rekonsiliasi Sistem MPN.	Kepercayaan Publik terhadap transaksi Penerimaan Negara (indikator: Opini WTP dari BPK).
2.	Pengembangan Sistem MPN G-2 berbasis *Electronic Billing*.	Tersedianya layanan transaksi Penerimaan Negara berbasis *electronic Billing*.	Publik dapat mengakses layanan penerimaan negara secara tidak terbatas, akurat, fleksibel, dan akuntabel.

Progress
Peningkatan Kualitas Dan Akuntabilitas Data Transaksi Penerimaan Negara Dalam Sistem MPN G-1

PROSES TINDAK LANJUT REKONSILIASI

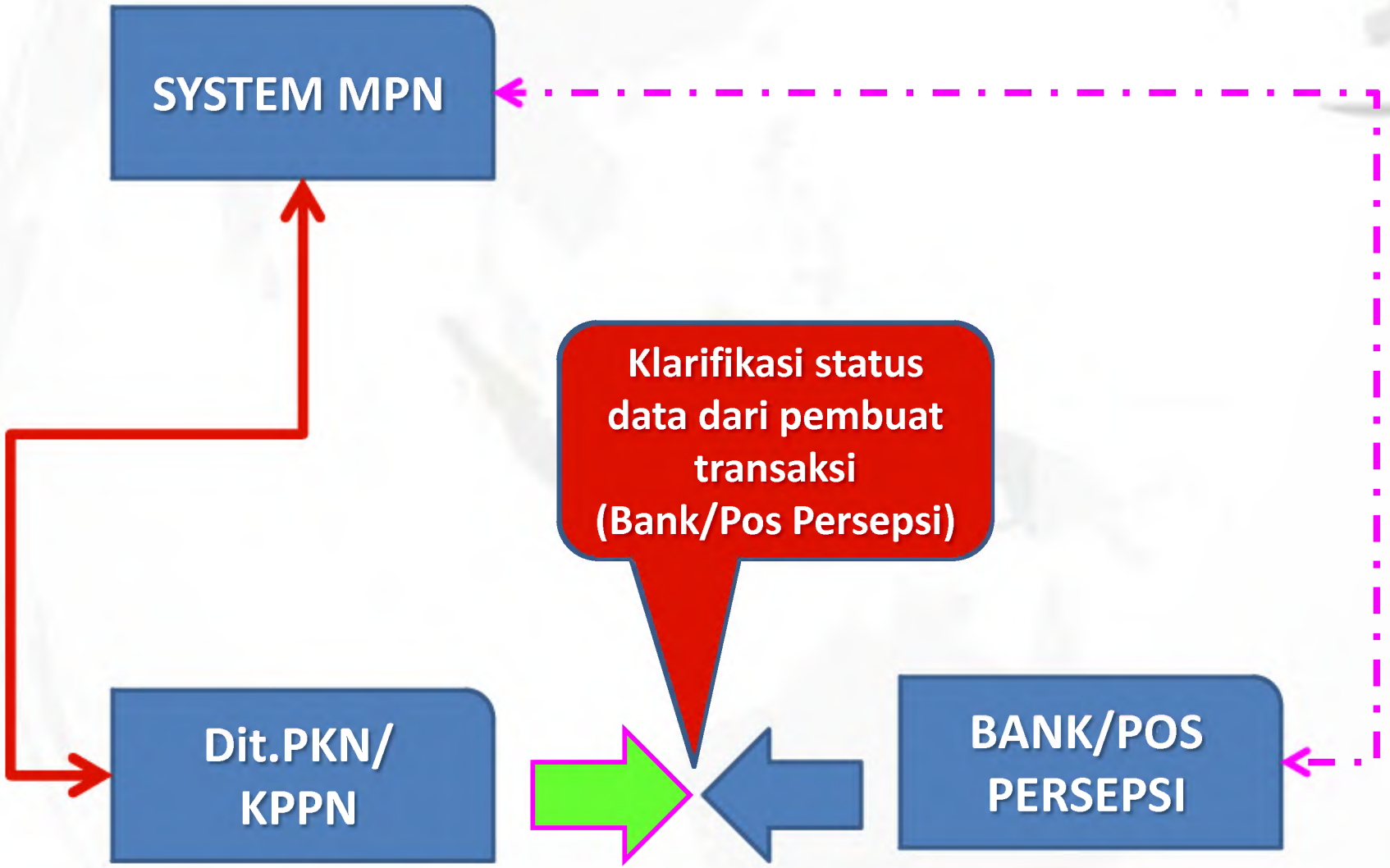

Tahapan Tindak Lanjut Hasil Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara Tahun 2011

Jangka Waktu Pengelolaan Data Modul Penerimaan Negara

Tahap I	3 Hari
Tahap II	1 Bulan
Tahap III	3 Minggu
Tahap IV	1 Minggu

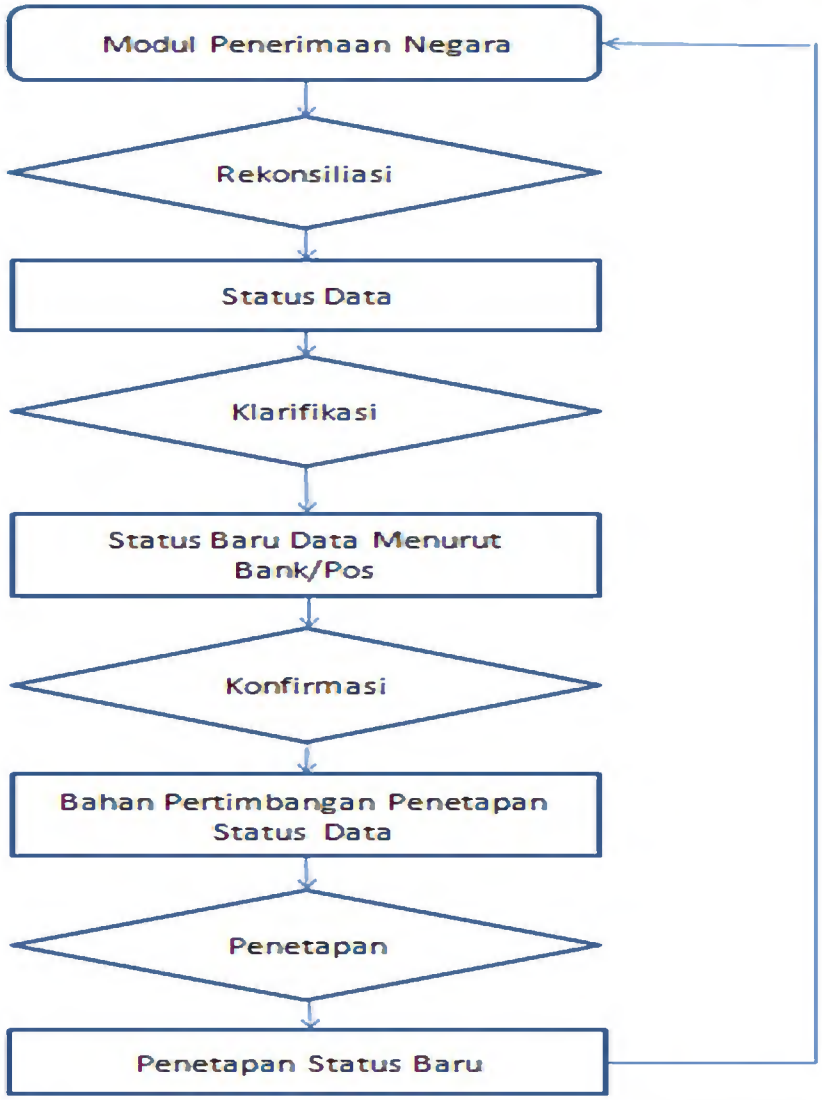

Progress Capaian Peningkatan Kualitas Dan Akuntabilitas Data Transaksi Penerimaan Negara Melalui Sistem MPN (*Existing*)

Prosentase Data MPN pada minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 42

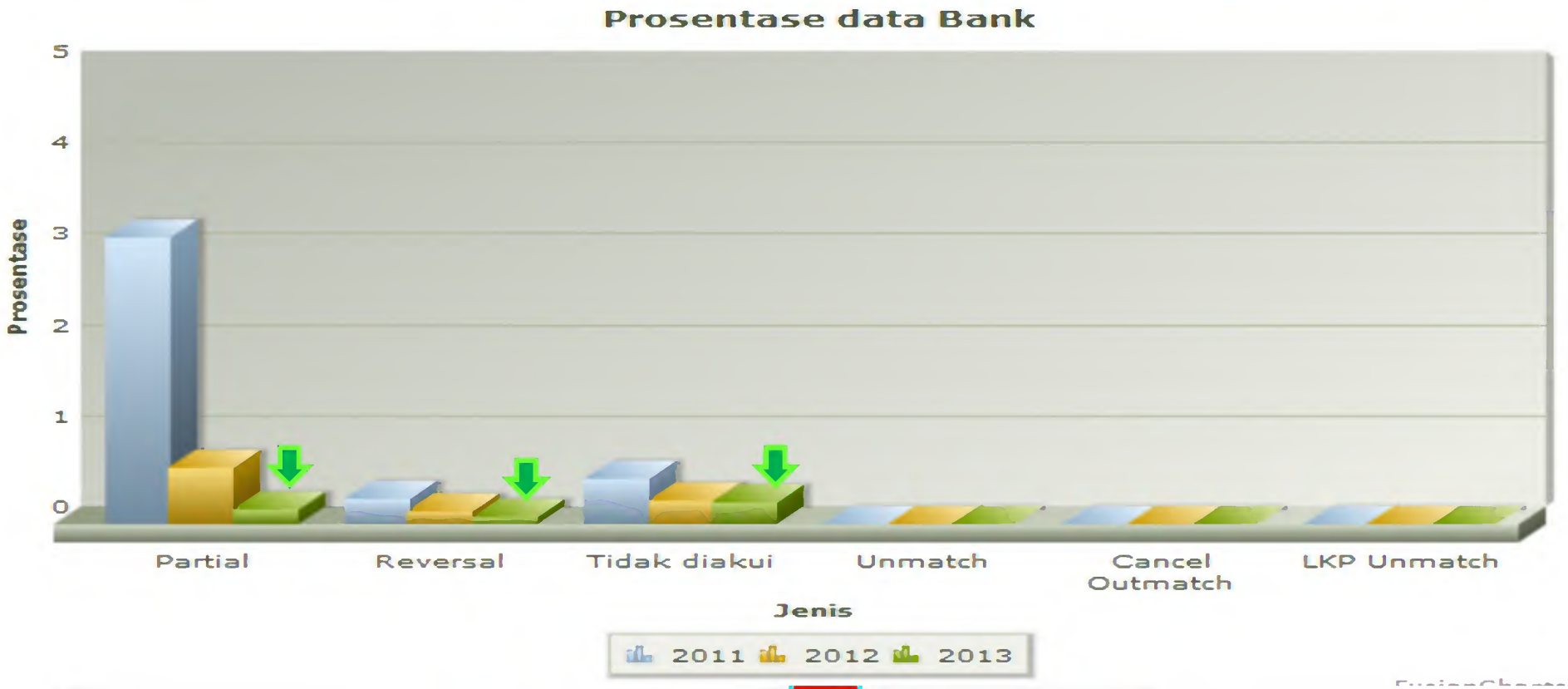

Sudah dapat dicapai Opini WTP atas LKPP (LKKL BA 015) Tahun 2011 dan 2012.

Monitoring Kualitas Dan Akuntabilitas Data Transaksi Penerimaan Negara Melalui Sistem MPN (*Existing*) s.d. Minggu ke-42

Data Jumlah Transaksi MPN pada minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 42

Jenis	Jumlah Transaksi 2011		Jumlah Transaksi 2012		Jumlah Transaksi 2013	
	Transaksi	Prosentase	Transaksi	Prosentase	Transaksi	Prosentase
Match	29.049.288	96,0410	33.364.623	98,9318	34.637.477	99,4681
Partial	952.111	3,1478	210.012	0,6227	62.183	0,1786
Total Data Valid	30.001.399	99,1888	33.574.635	99,5545	34.699.660	99,6467
Reversal	87.001	0,2876	50.219	0,1489	33.828	0,0971
Tidak Diakui	152.283	0,5035	91.197	0,2704	84.656	0,2431
Unmatch	3.901	0,0129	4.833	0,0143	3.109	0,0089
Cancel Outmatch	2.188	0,0072	3.993	0,0118	1.435	0,0041
Total MPN	30.246.772	100	33.724.877	100	34.822.688	100
LKP Unmatch	1.507	0,0050	3.919	0,011	1.538	0,0044

Jumlah Transaksi Penerimaan Negara Valid Tahun 2012 *Weeks on Weeks* meningkat sebesar 11,91% dari Tahun sebelumnya, sedang Tahun 2013 hanya sebesar 3,35%. Kendati demikian, dari sisi Nilai Transaksi Valid, peningkatan Tahun 2013 sebesar 14,98% dari tahun sebelumnya, sementara untuk Tahun 2012 berada pada tataran 12,27%.

Data Nilai Transaksi MPN pada minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 42

Jenis	Nilai Transaksi 2011		Nilai Transaksi 2012		Nilai Transaksi 2013	
	Nilai	Prosentase	Nilai	Prosentase	Nilai	Prosentase
Match	586.291.400.743.348	90,6777	697.509.225.584.653	97,1372	814.491.886.611.609	98,8433
Partial	46.499.402.916.431	7,1917	12.985.072.013.888	1,8083	2.445.825.155.244	0,2968
Total Data Valid	632.790.803.659.779	97,869	710.494.297.598.541	98,945	816.937.711.766.853	99,1401
Reversal	5.573.868.827.259	0,8621	5.408.038.117.358	0,7531	3.017.716.478.366	0,3662
Tidak Diakui	3.131.434.163.815	0,4843	1.956.528.479.440	0,2725	3.962.481.807.063	0,4809
Unmatch	5.036.747.798.302	0,7790	155.739.077.934	0,0217	46.266.291.918	0,0056
Cancel Outmatch	33.600.396.315	0,0052	51.139.837.990	0,0071	59.546.398.363	0,0072
Total MPN	646.566.454.845.470	100	718.065.743.111.263	100	824.023.722.742.563	100
LKP Unmatch	481.630.020.476	0,0745	111.738.477.254	0,0156	7.847.599.874	0,0010

PROGRESS KUALITAS DAN AKUNTABILITAS DATA TRANSAKSI PARTIAL-MATCH (TAHUN 2011 – 2013)

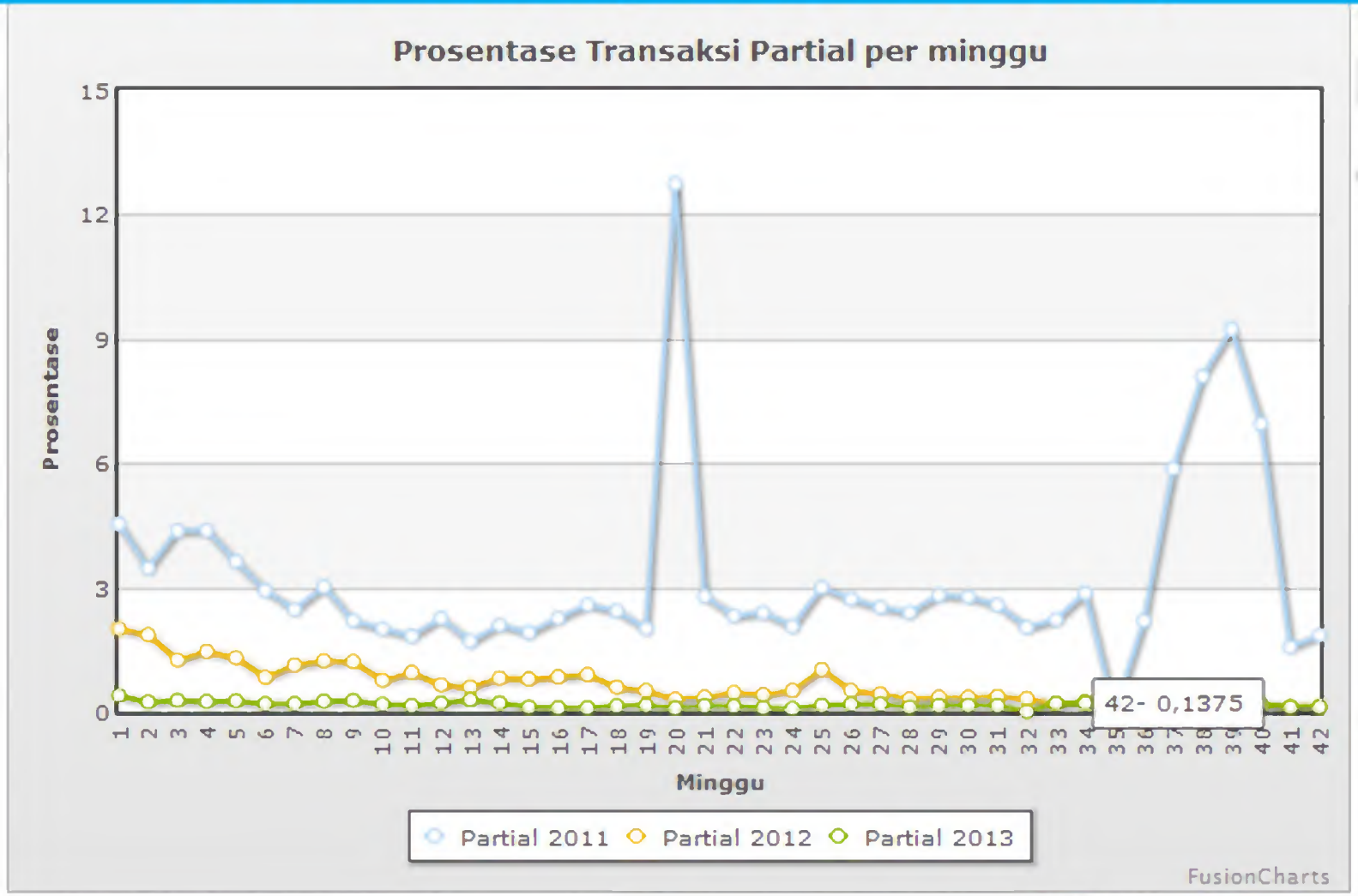

Hingga Minggu ke-42 Tahun 2013, berhasil dicapai penurunan jumlah data transaksi *Partial Match* hingga 0,13% dari keseluruhan data transaksi Penerimaan Negara. TIDAK ADA TARGET KHUSUS untuk menurunkan tingkat Partial Match, karena pada prinsipnya, Auditor BPK RI sudah dapat memahami kondisi Partial Match sebagai bagian dari transaksi Match. Perbedaan lebih bersifat administratif.

PROGRESS KUALITAS DAN AKUNTABILITAS DATA TRANSAKSI REVERSAL (TAHUN 2011 – 2013)

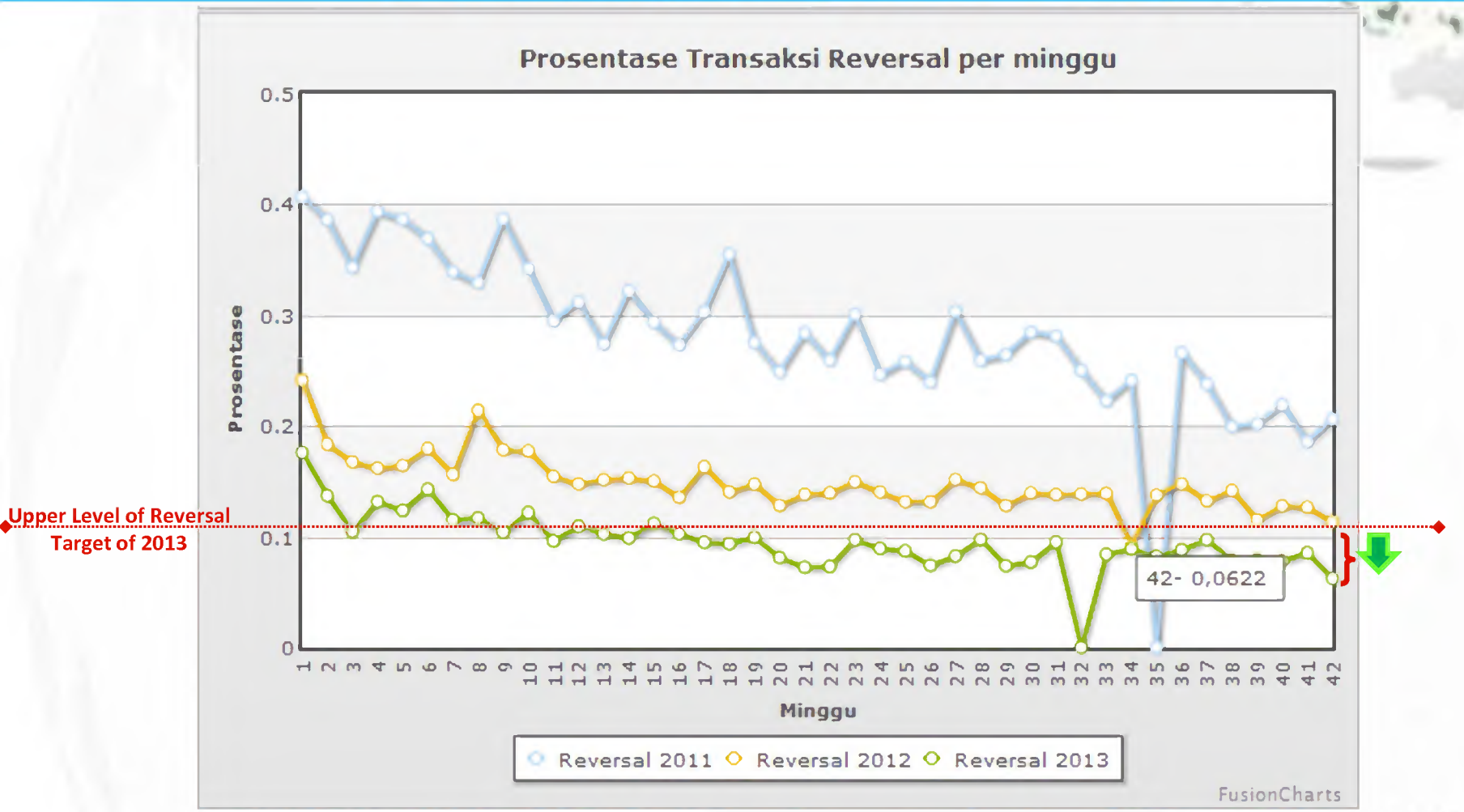

Hingga Minggu ke-42 Tahun 2013, sudah berhasil dicapai penurunan data transaksi *Reversal* hingga 0,06% dari keseluruhan data transaksi Penerimaan Negara, dengan *trend* penurunan yang *sustainable* hingga akhir 2013.

Target toleransi Tahun 2013 yang disepakati Rapat Mingguan TOM sebesar 0,11%.

PROGRESS KUALITAS DAN AKUNTABILITAS DATA TRANSAKSI TIDAK DIAKUI (TAHUN 2011 – 2013)

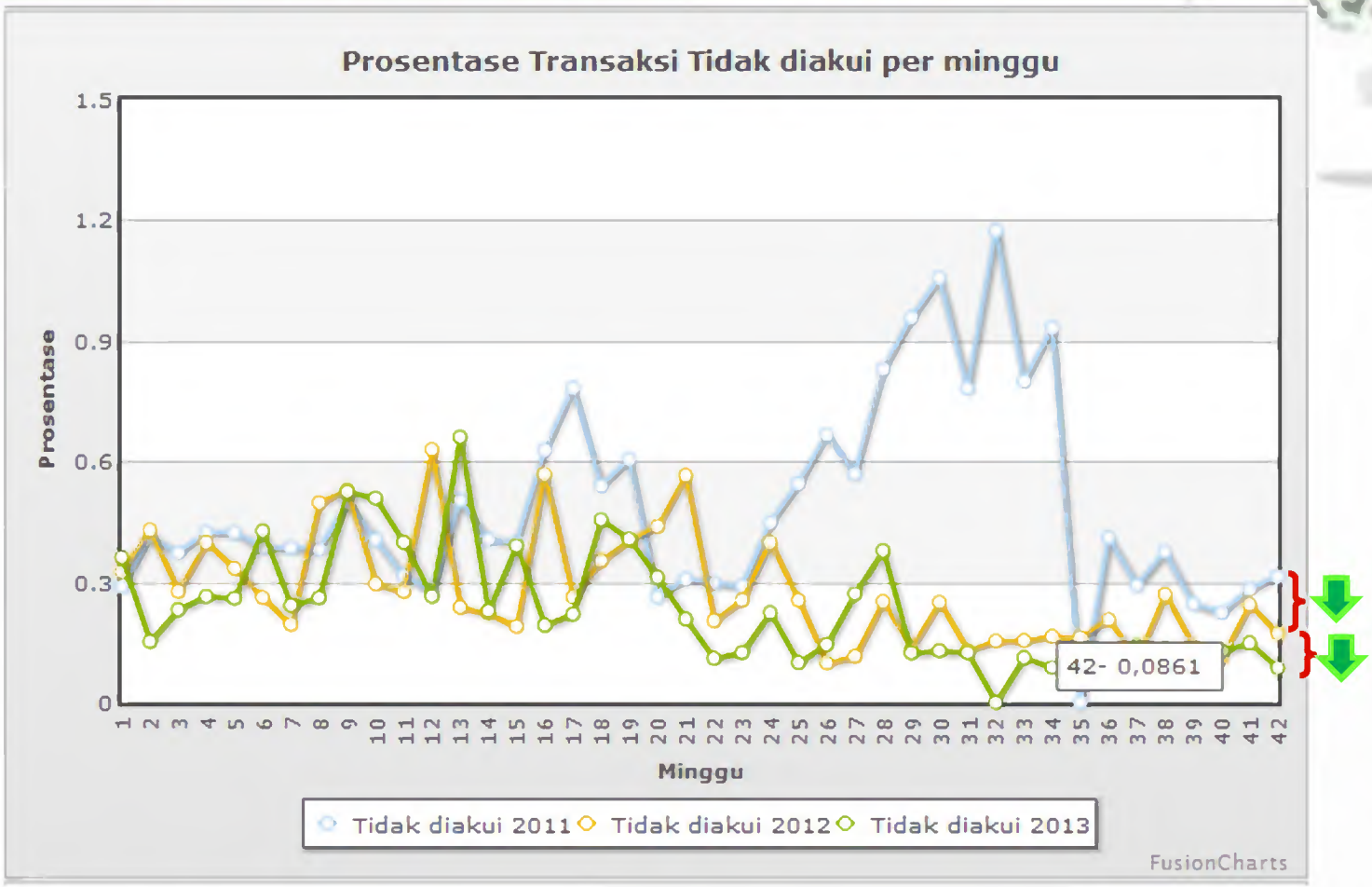

Hingga Minggu ke-42 Tahun 2013, berhasil dicapai penurunan jumlah data transaksi *TIDAK DIAKUI* hingga 0,086% dari keseluruhan data transaksi Penerimaan Negara. Sebelumnya, tingkat Data Transaksi TIDAK DIAKUI mencapai 0,31% (Tahun 2011) dan 0,17% (Tahun 2012).

STATUS PENYEMPURNAAN SISTEM MPN G-2 HINGGA 20 FEBRUARI 2014

Arah Penyempurnaan Sistem MPN

Dari Kondisi	Menjadi	Manfaat
Manual Billing System	Electronic Billing System	Akuntabilitas, Fleksibilitas, dan Kecepatan Penguasaan Kas
Layanan *Over The Counter*	Layanan *On-line* dan Fleksibel	Ketersediaan Layanan Tanpa Tergantung Waktu dan Tempat
Tidak Melayani **Seluruh** Transaksi Penerimaan Negara	Melayani **Seluruh** Transaksi Penerimaan Negara	Akuntabilitas seluruh data transaksi penerimaan negara
Layanan *Single Currency (Rupiah)*	Layanan *Multiple Currencies* (termasuk Valas)	Ketersediaan Kas dalam berbagai jenis Valuta
Disclaimer	WTP	Kepercayaan Publik
Pengelolaan Layanan Dan Data Transaksi Per Unit Eselon I (Individual)	Pengelolaan Layanan Dan Data Transaksi Bersama dan Terkoordinasi	Kesatuan Database dan Informasi Penerimaan Negara

PROGRESS PENGEMBANGAN SISTEM MPN MENUJU SISTEM MPN G-2

No.	Sistem MPN Menuju MPN G-2	Jadwal Operasionalisasi	Status	Agen Layanan (Bank/Pos Persepsi)	Progress
1.	Sistem MPN ***(Existing System)***	Sejak Tahun 2007	*Steady*	Semua Bank/Pos Persepsi	Opini WTP (Tahun 2011, 2012)
2.	Sistem MPN ***(Existing System Plus fasilitas ATM)***	Mulai Juli 2013 (OTC), November 2013 (ATM)	*On progress*	**1. OTC** (Semua) **2. ATM** (BRI, BNI, Mandiri, BCA)	**Khusus PPh Final Akun 411128 KJS 420 (PP 46/2013)**
3.	Sistem MPN **(Lojik layanan MPN G-2, Infrastruktur *Existing System*)**	Sejak 6 Februari 2012	*Expanded* ke seluruh Indonesia	Bank/Pos Persepsi (Bank Mandiri, Kantor Pos). Sudah dilayani melalui *e-banking* dan ATM.	**Khusus Pembayaran Pajak.** (Jumlah Pengguna meningkat signifikan. Real Tahun 2013=8341 transaksi senilai Rp 613,42 miliar)
4.	Sistem MPN Valas ***(Existing System, valuta dalam USD)***	Sejak November 2012	*Steady*	Bank Persepsi BNI	Untuk Pajak & PNBP (Real Tahun 2013: 1439 transaksi senilai USD273.7juta = 358T)
5.	**Sistem MPN G-2**	Piloting pada Triwulan IV Februari 2014	*On progress (BRI siap live Januari 2014)*	Bank/Pos Persepsi Peserta Piloting (BRI, BNI, Mandiri, BCA, BJB, Posindo, Rabobank, CIMB Niaga, Permata, Citibank)	Telah selesai dilakukan UAT terhadap 5 Bank/Pos Persepsi.

PENGEMBANGAN SISTEM MPN G-2

Arsitektur Sistem MPN-G2

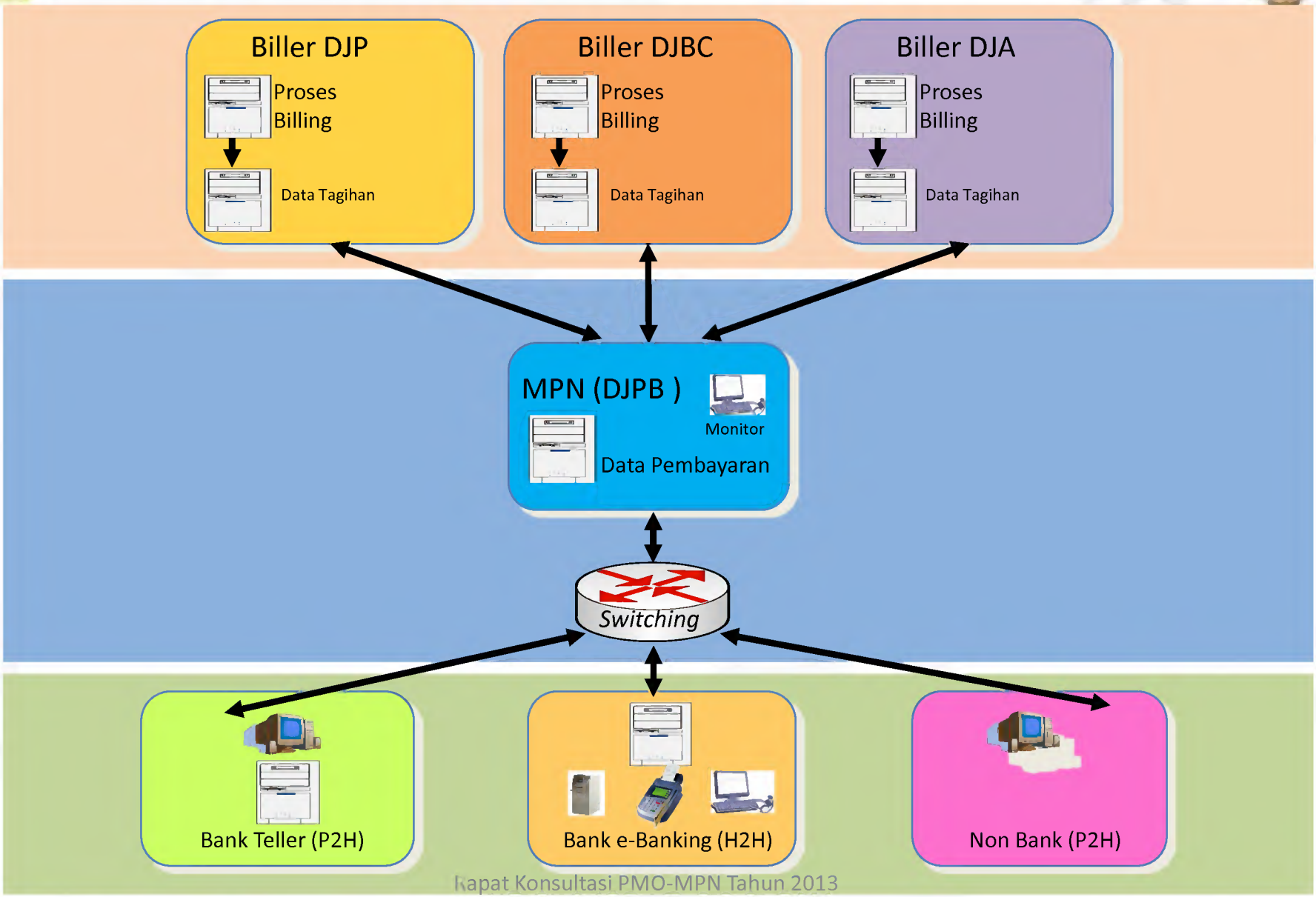

Sumber : KAK Switcher

Peta Peran Dalam Arsitektur MPN G-2

Billing System (Sistem Pencatatan Tagihan)

- Menyiapkan interface yang sudah terkoneksi dengan sistem settlement MPN G2
- Memungkinkan dilakukannya proses create billing dengan men-*generate* ID_Billing

Settlement System (Sistem Pembayaran Tagihan)

- Menyiapkan interface dari arah biller
- Menyiapkan interface dari arah switcher
- Men-*generate* notifikasi transaksi penerimaan negara (NTPN)

Switching System (Sistem Pengaturan Lalu-Lintas Transaksi)

- Menyiapkan interface ke arah sistem settlement
- Menyiapkan interface dari arah CA Persepsi
- Menyiapkan link yang terhubung ke CA Persepsi
- Memungkinkan berjalannya proses rekonsiliasi

Collecting Agents System (Sistem Penyetoran Uang Pembayaran)

- Menyiapkan interface ke arah sistem Settlement
- Memungkinkan berjalannya proses transaksi pembayaran setoran penerimaan negara dan penerbitan notifikasi keabsahan setoran penerimaan negara

MODEL KOMUNIKASI DATA DALAM SISTEM MPN G-2

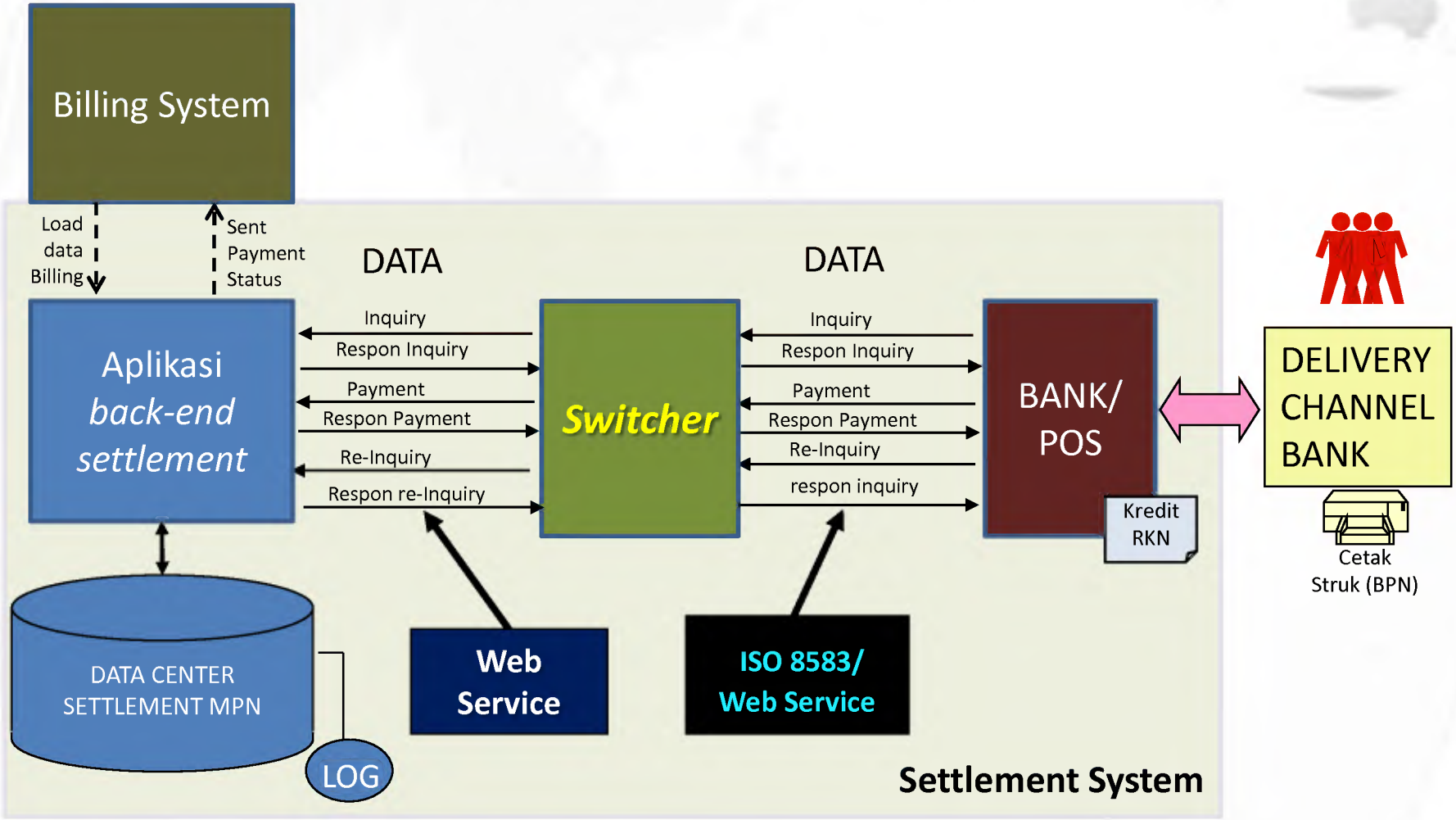

PRINSIP KERJA SISTEM MPN G-2

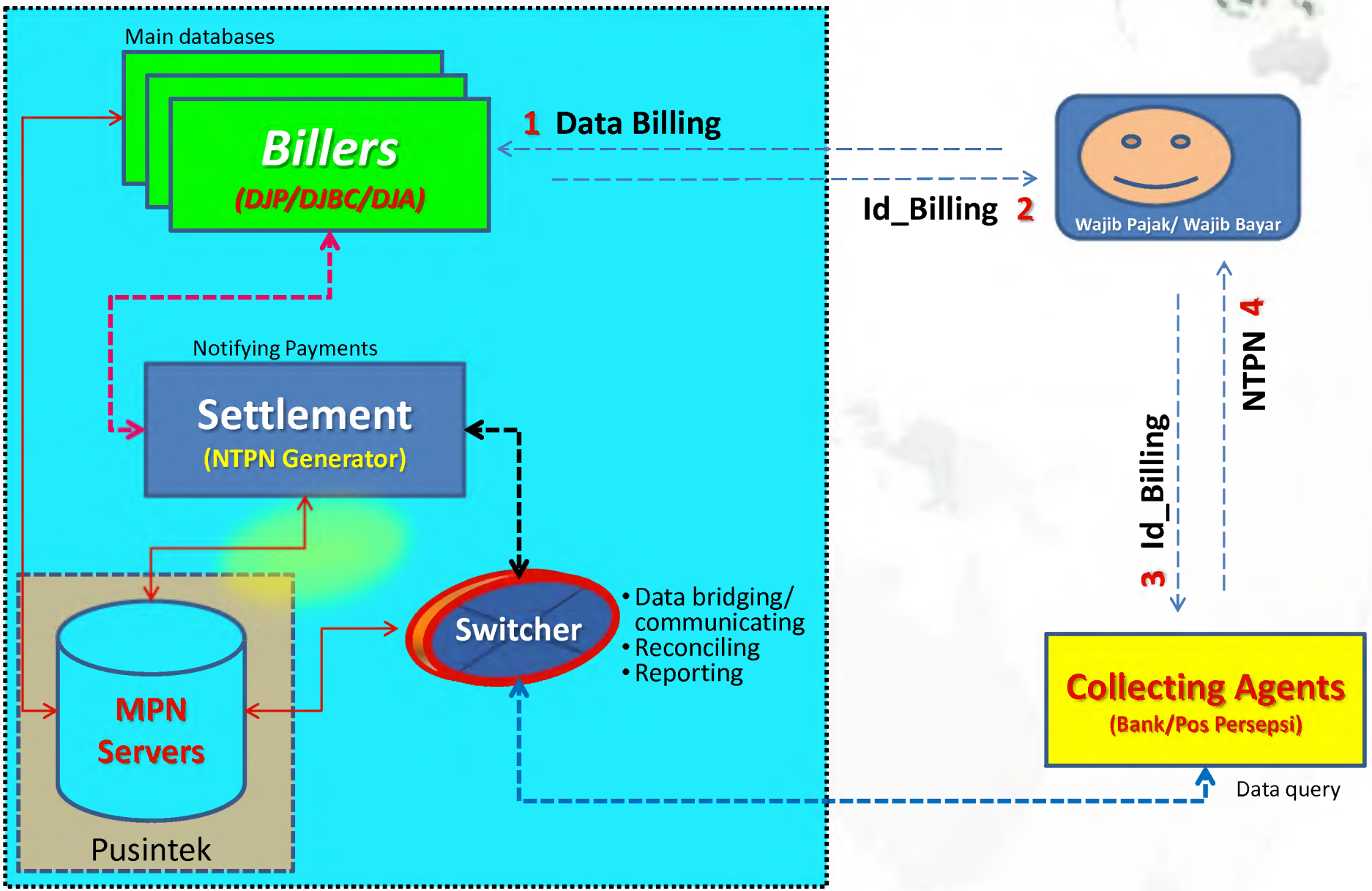

Langkah-Langkah Pokok Bertransaksi Melalui Sistem MPN G-2

1. Wajib Pajak/Wajib Bayar mengakses **Sistem Billing** untuk melakukan prosedur *Create Billing*.
2. **Sistem Billing** merespons dengan memberikan notifikasi berupa kode *Id_Billing (pada saat yang sama mengirimkan Id_Billing tersebut ke **Sistem Settlement** (2.a)).*
3. Wajib Pajak/Wajib Bayar mengakses **Sistem Collecting Agents** untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan notifikasi *Id_Billing*. Akses dapat dilakukan melalui berbagai Kanal Pembayaran (*Over the Counter*, ATM, atau *e-banking* atau sarana elektronis lainnya). Kanal Pembayaran meneruskan akses tersebut ke *Core-Banking System* (3.a) untuk diteruskan ke **Sistem Switching** Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari **Sistem Settlement** (3.b).
4. **Sistem Settlement** memberikan respons dengan notifikasi pembayaran yang berupa kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan mengirimkannya kembali ke **Sistem Collecting Agents** melalui **Sistem Switching**, yang pada saat yang bersamaan mengirimkannya pula ke **Sistem Billing** (4.a). Sistem Switching meneruskan notifikasi tersebut ke *Core-Banking System* (4.b) untuk diteruskan ke Kanal Pembayaran (4.c) dan diterbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) bagi Wajib Pajak/Wajib Bayar (4.d).

LOJIK LAYANAN SISTEM MPN G-2 (SIMULASI)

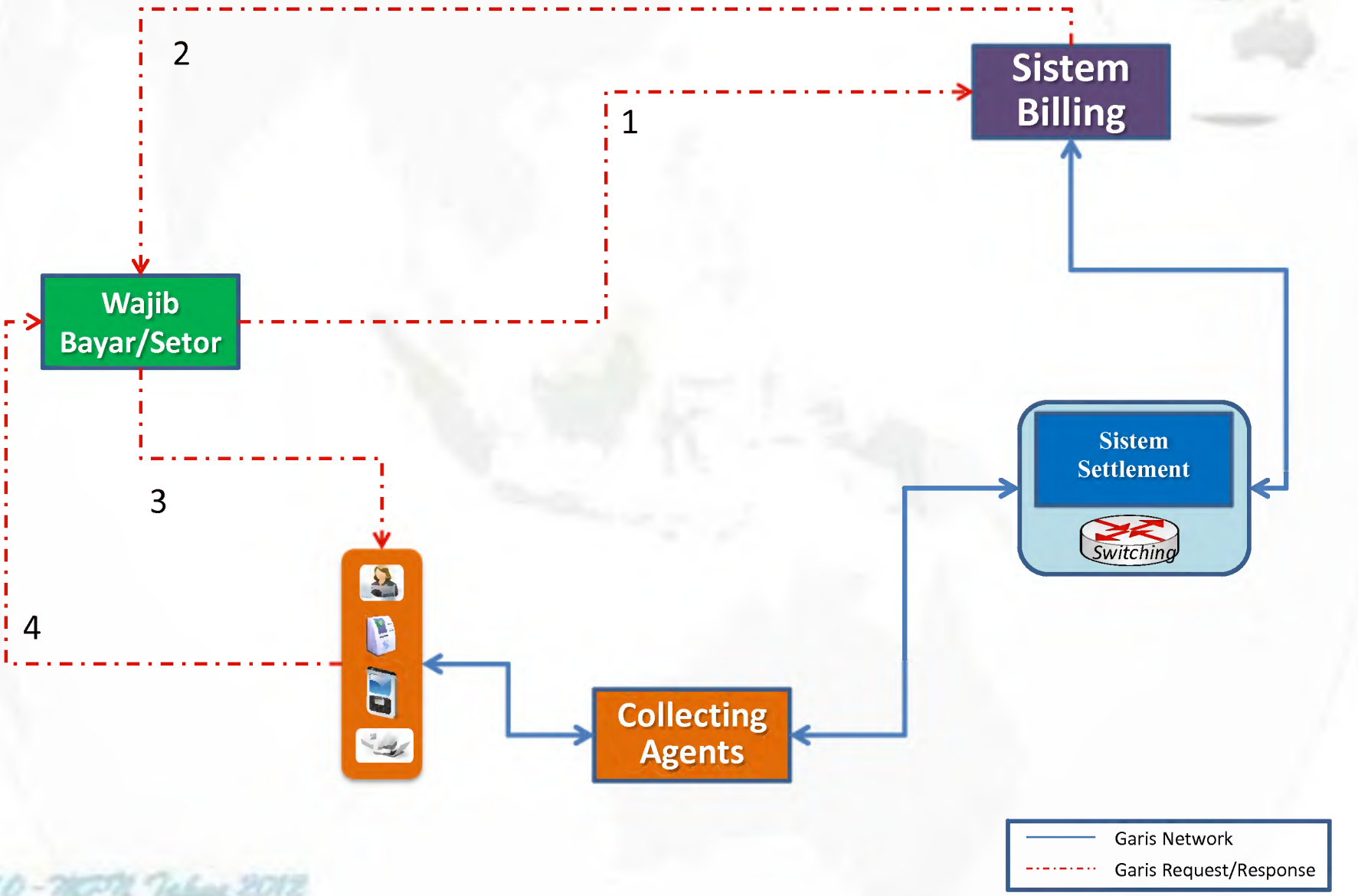

GAMBARAN UMUM LAYANAN SISTEM MPN G-2

Sistem Collecting Agents

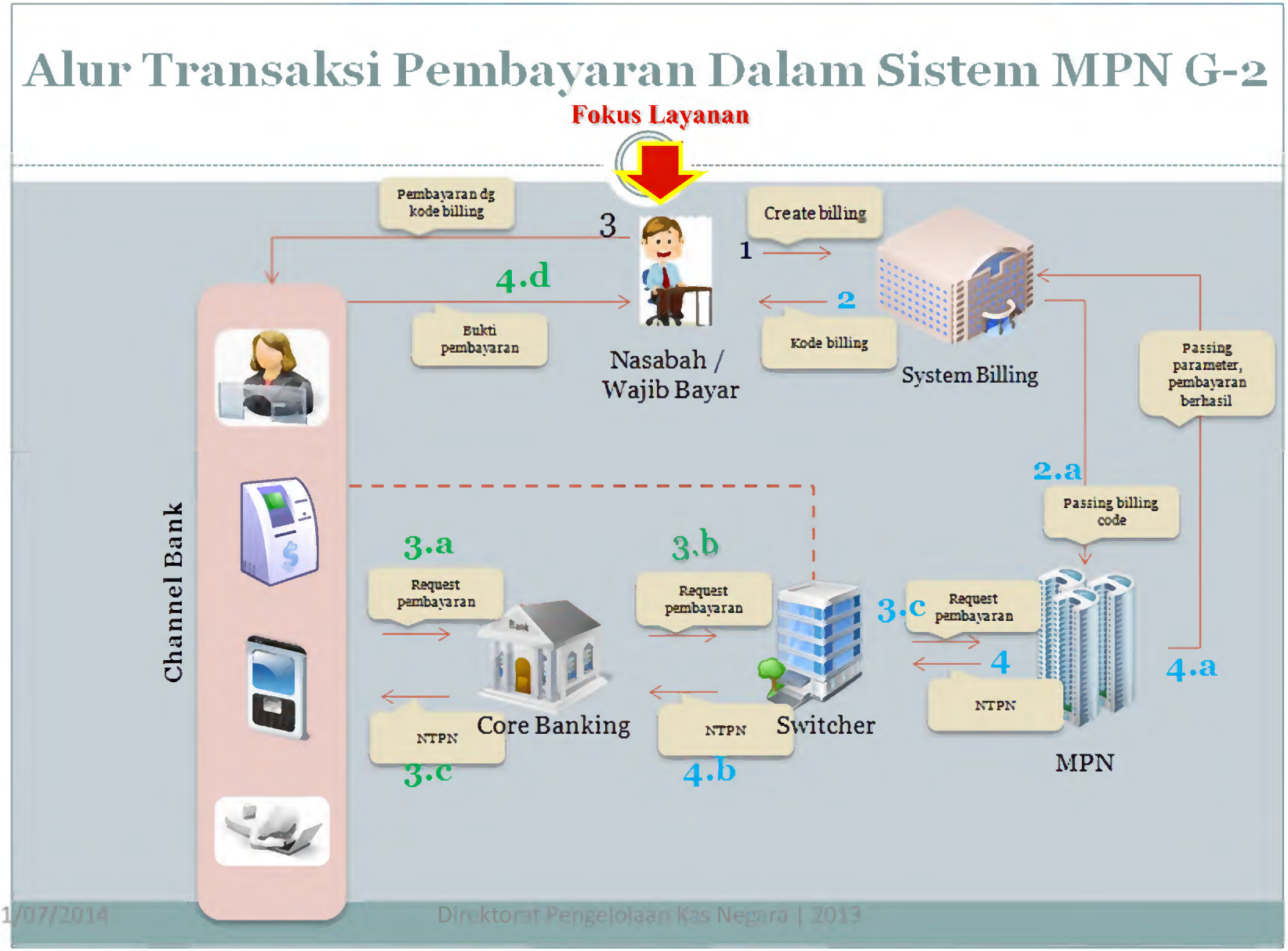

Sistem Kementerian Keuangan

KESIAPAN IMPLEMENTASI SISTEM MPN G-2

KESIAPAN SISTEM MPN G-2 SEJAK PELAKSANAAN SIMULASI MENYELURUH PADA TANGGAL 28 NOVEMBER 2013

Layanan Sistem MPN G-2 dalam Launching tanggal 27 Februari 2014 dilakukan oleh PT BRI (Persero) Tbk sesuai penunjukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-40/PB/2014. Empat Bank/Pos Persepsi lain (BNI, Mandiri, CIMB Niaga, dan PT Posindo) yang telah dilakukan UAT sudah siap untuk mulai dioperasikan setelah tahap ini.

Milestones:

- Pengembangan *Sistem Switching* selesai bulan September 2013.
- Ujicoba secara terstruktur dilakukan sepanjang bulan Oktober sampai pertengahan November 2013.
- Secara fungsional, Sistem MPN G-2 telah sukses dilakukan **Simulasi Menyeluruh** dihadapan Bapak Menteri Keuangan dan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan pada tanggal **28 November 2013**.

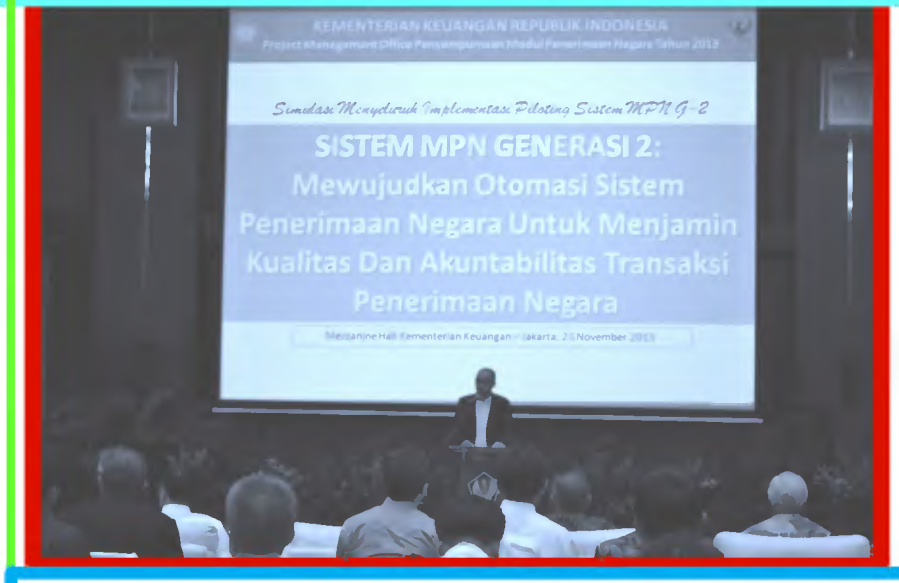

Status ***Check-lists*** kesiapan pelaksanaan piloting pada Minggu Keempat Februari 2014 terkait kesiapan **infrastruktur, Manual Sistem, SOP, Organisasi dan SDM, Regulasi, *Service-Desks*, serta Dokumentasi Sistem** MPN G-2 telah memperoleh konfirmasi ulang dari PIC 5 unit eselon I terkait (**Setjen, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Perbendaharaan**) dan telah dibahas dalam Rapat Evaluasi Ketujuh Kesiapan Piloting Implementasi Sistem MPN G-2 pada tanggal 24 Februari 2014.

Status 27 Februari 2014:

- Telah dilakukan UAT terhadap 5 peserta Piloting (**Telah Lulus:** BRI, BNI, Mandiri, PT Pos).
- Telah dilakukan Uji Beban Puncak (*Stress-Test*), terakhir dengan 2,099 juta transaksi dengan hasil baik tanpa NTPN ganda.
- Bapak Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor (32/PMK.05/2014) tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik pada tanggal 10 Februari 2014.

PELAKSANAAN LAUNCHING TRANSAKSI PERDANA SETORAN PENERIMAAN NEGRA MELALUI SISTEM MPN G-2

Pelaksanaan Transaksi Perdana Setoran Penerimaan Negara Melalui Sistem MPN G-2 tanggal 27 Februari 2014 2 kota terpisah (Pasuruan - Jatim, dan Banjarmasin - Kalsel) yang disaksikan langsung secara Live Streaming dan melalui Video Conference dari Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta oleh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan [Bapak Marwanto Harjowiryono (Dirjen Perbendaharaan) Bapak Askolani (Dirjen Anggaran), Bapak Rionald Silaban (Staf Ahli Menkeu Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi), Bapak Bobby A. A. Nazief (Staf Khusus Menkeu Bidang Teknologi Informasi), dan para pejabat eselon II yang mewakili Sekjen Kemenkeu, Irjen Kemenkeu, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Bapak Asmawi Sjam (Direktur Bisnis Kelembagaan PT BRI (Persero) Tbk).

Investor Daily/antara/HO/aprilia

Transaksi Penerimaan Negara

Direktur Bisnis Kelembagaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Asmawi Syam (tengah) disaksikan antara lain oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono dan Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menandatangani dokumen berita acara pelaksanaan Transaksi Perdana Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G-2) di Kantor Kemenkeu Jakarta, Kamis (27/2). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan satu-satunya bank yang dinilai siap dan mampu mengimplementasikan MPN G-2 yang dibangun oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Perbankan. Modul ini merupakan sarana bagi Wajib Pajak (WP), Wajib Bayar (WB) dan Wajib Setor (WS) untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara, antara lain Pajak, Cukai dan Pabean, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan mengedepankan prinsip Tepat Orang, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah.

PERKEMBANGAN INTEGRASI PERBANKAN DALAM SISTEM MPN G-2

MONITORING SIT DAN UAT MPN G2

54	21	7	18	3	5
TERDAFTAR	NETWORK	FUNGSIONAL	SIT	UAT	PILOTING

Home / Main page / Dashboard

TABEL BANK DALAM PROSES PENGUJIAN FUNGSIONAL

Bank Permata | Rabobank | UOB | Deutsche Bank

BPD DIY | Sinar Mas | Bank DBS Indonesia

Bank Jatim

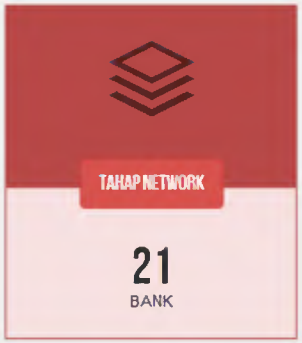

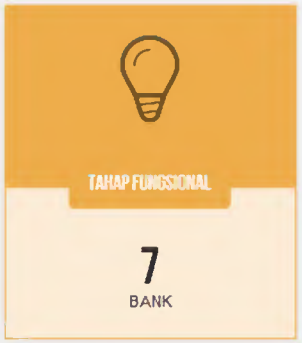

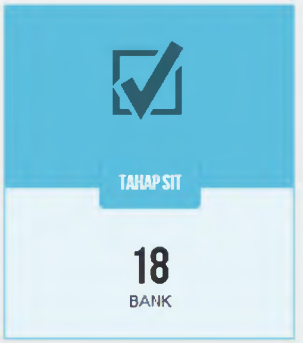

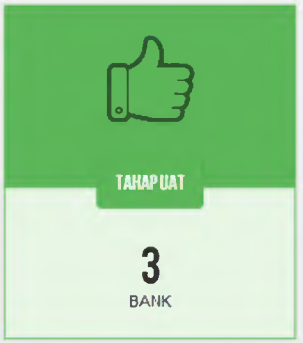

TABEL BANK DALAM PROSES SIT

Nama Bank	No Ijin	Tgl Mulai	Leader	Petugas 1	Petugas 2	Keterangan
Bank Sumut	S-4259/PB.3/2014	2014-07-04	Urip Burhan	Mahmud		
Bank Syariah Mandiri	S-4255/PB.3/2014	2014-07-04	Urip Burhan	Farid Nurhidayat	Fajar Rokhmawan Yunandaru	
Bank Ekonomi	S-4259/PB.3/2014	2014-07-04	Urip Burhan	Tri Margiyanto		
BPD Papua	S-4255/PB.3/2014	2014-07-04	Urip Burhan			
Bank Hana	S-2626/PB.3/2014	2014-04-23	Urip Burhan	Herlambang Febriyanto	Mahmud	
Bank Jatim		1970-01-01				
PT BPD Nusa Tenggara Timur	S-4259/PB.3/2014	2014-07-04	Urip Burhan			

TABEL BANK SELESAI SIT BELUM UAT

Nama Bank	Tgl Selesai SIT
BCA	2014-03-28
HSBC	2014-05-28
JP Morgan	2013-11-12
BII	2014-01-29
BNI Syariah	2014-04-24
Bank Riau	2014-05-15
BPD Kalsel	2014-05-19
Commonwealth	2014-06-10
Bank Nusantara Parahyangan	2014-05-09
BPD Lampung	2014-07-01
Bank Tokyo	2014-06-10

HASIL MONITORING REALISASI TRANSAKSI SISTEM MPN G-2

Grafik Penerimaan

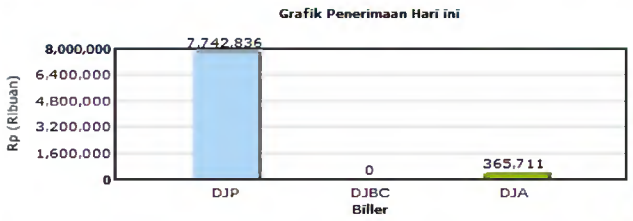

Profile Pembayaran

pe Channel	Total Transaksi	Total Pembayaran
ATM	48	22.211.264
Internet Banking	93	680.126.418
Mobile Banking	18	138.104.500
Teller	520	7.268.104.884
TOTAL	679	8.108.547.066

Profile CA

Bank	Total Transaksi	Total Pembayaran
BANK CIMB NIAGA	22	326.807.877
BANK MANDIRI	235	3.585.105.547
BANK NEGARA INDONESIA	79	1.421.008.468
BANK RAKYAT INDONESIA	298	2.681.480.060
POS INDONESIA	45	94.145.114
TOTAL	679	8.108.547.066

DJP

Billing
986

Terbayar
544

Penerimaan (Rp)
7.742.836.161

DJBC

Billing
0

Terbayar
0

Penerimaan (Rp)
0

DJA

Billing
79

Terbayar
135

Penerimaan (Rp)
365.710.905

TOTAL

Billing
1065

Terbayar
679

Penerimaan (Rp)
8.108.547.066

Summary

Live Billing Transaction

Biller	Kode Billing	Nama Wajib Bayar	Jumlah	Waktu Transaksi
DJA	820140710000094	BENDAHARA PENERIMAANUTM	1.478.750.000	10-07-14 09:20:16
DJA	820140710000093	Pengadilan Tinggi Banten	40.000	10-07-14 09:16:44
DJBC	520140700000049	H.F. PRIMA, PR.	77.634.000	08-07-14 00:00:00
DJBC	520140700000039	GUDANG GARAM, PT.	141.838.500.000	08-07-14 00:00:00
DJP	014070010787485	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELA	381.818	10-07-14 09:48:17
DJP	014070010788611	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KEL	800.000	10-07-14 09:48:17

Live Payment Transaction

Kode Billing	Nama Wajib Bayar	Jumlah	NTPN	Waktu Transaksi
820140708000223	HAFNI JAYANTI	69.000	9A21D5U51HG1OR30	10-07-14 09:47:28
014070010773761	BALI DESYANA WEDDING BUTLER	283.426	795E22REKC92EC38	10-07-14 09:47:12
820140708000217	HAFNI JAYANTI	460.000	904FD5U50U509930	10-07-14 09:47:10
014070009874647	BEND.KEJAKSAAN NEGERI POLEWALI	13.636	3C9B3196L393P532	10-07-14 09:47:03
014070010262121	ERRY HENDRA TAMBUNAN K	38.600	9115600SQTHIFN1E	10-07-14 09:46:57
014070009976192	BRI KANTOR CAB.UJUNG PANDANG S	458.000	A92F6195Q14ULG32	10-07-14 09:46:52

© Direktorat Sistem Perbendaharaan 2013 All Rights Reserved

HASIL MONITORING REALISASI TRANSAKSI SISTEM MPN G-2

Grafik Penerimaan

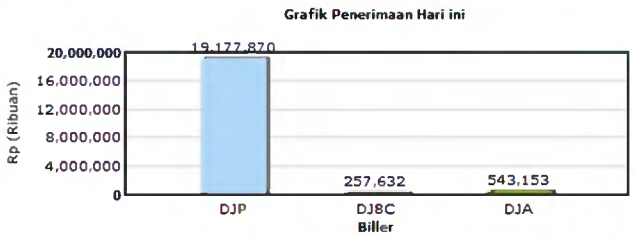

Profile Pembayaran

pe Channel	Total Transaksi	Total Pembayaran
ATM	71	42.671.519
Internet Banking	131	747.910.934
Mobile Banking	19	154.632.292
Teller	1.036	19.033.439.613
TOTAL	1.257	19.978.654.358

Profile CA

Bank	Total Transaksi	Total Pembayaran
BANK CIMB NIAGA	65	1.400.055.263
BANK MANDIRI	424	12.705.959.139
BANK NEGARA INDONESIA	206	1.890.132.054
BANK RAKYAT INDONESIA	477	3.841.568.664
POS INDONESIA	85	140.939.238
TOTAL	1.257	19.978.654.358

DJP

Billing
1554
Terbayar
1071
Penerimaan (Rp)
19.177.869.737

DJBC

Billing
8
Terbayar
4
Penerimaan (Rp)
257.631.600

DJA

Billing
165
Terbayar
182
Penerimaan (Rp)
543.153.021

TOTAL

Billing
1727
Terbayar
1257
Penerimaan (Rp)
19.978.654.358

Live Billing Transaction

Biller	Kode Billing	Nama Wajib Bayar	Jumlah	Waktu Transaksi
DJA	820140710000187	BENDAHARA PENERIMAAN POLRES PENAJAM PASER UTARA	3.350.000	10-07-14 11:37:54
DJA	820140710000186	Bendahara Penerimaan BBTKLPP Yogyakarta	770.000	10-07-14 11:37:04
DJBC	520140700000058	DJAGUNG PADI MAS, PT	131.280.000	10-07-14 00:00:00
DJBC	520140700000061	H.F. PRIMA, PR.	8.064.000	10-07-14 00:00:00
DJP	014070011354315	DWIWARNA SENTOSA	10.426.866	10-07-14 12:02:30
DJP	014070011353122	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PER	90.909	10-07-14 12:02:22

Live Payment Transaction

Kode Billing	Nama Wajib Bayar	Jumlah	NTPN	Waktu Transaksi
014070010403145	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO	2.655.218	FD27019ACN0L7832	10-07-14 12:01:14
820140710000111	HALIMAH	2.837.800	539F92EJUQSDJQ39	10-07-14 12:01:12
014070009563793	MABARFEED INDONESIA	417.420	1C75D414K20I0438	10-07-14 12:01:03
014070010434743	RUTIN KANTOR STATISTIK KODYA B	450.000	CE07526QPHO5SM39	10-07-14 12:00:39
014070009955151	POONG IN INDONESIA	129.817.252	5184A40O1R4EUE38	10-07-14 11:59:33
014070010583123	MEGAPRIMA PERSADA SAKTI	8.527.193	565ED40LNTII6038	10-07-14 11:59:19

© Direktorat Sistem Perbendaharaan 2013 All Rights Reserved

"No Time, but Improving ..."

Terima kasih.